

Sekolah di Tengah Ketegangan Negara, Agama, dan Pasar: Membaca Potensi Gerakan Sosial SMA Kolese de Britto 1960-2000

Yohanes Sanaha Purba

Abstrak. Sekolah merupakan aktor yang berperan dalam perubahan budaya suatu masyarakat. Hal itu mengandaikan bahwa sekolah menjadi entitas aktif yang mampu menegosiasikan kepentingannya di hadapan kekuasaan negara, pasar dan agama. Dengan mengambil konteks gerakan sosial sebagai salah satu bidang dalam kajian budaya, penelitian ini menempatkan SMA Kolese de Britto sebagai obyek penelitian karena keunikannya dalam menjalankan prinsip kebebasan sebagai dasar pendidikannya sejak tahun 1963 hingga saat ini. Tulisan ini meletakkan perubahan sosial sebagai indikator yang digunakan dalam mengolah seberapa jauh Kolese de Britto menjalankan kekuasaannya (pelaku atau subjek penafsir) ketika berhadapan dengan kekuasaan lain (negara, agama, pasar) yang di sisi lain justru mempengaruhi bahkan menentukan corak gerakannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengumpulkan rekaman-rekaman pengalaman historis 12 narasumber yang terdiri dari para guru, siswa dan karyawan yang hidup di SMA Kolese de Britto pada rentang 1960-2000. Dalam kurun waktu tersebut, kekuasaan negara, agama dan pasar mendominasi silih berganti dan menentukan tipologi pergulatan Kolese de Britto untuk menentukan identitasnya di tengah masyarakat.

Kata-kata Kunci: pendidikan bebas, gerakan sosial, sekolah Yesuit, sosiologi pendidikan, kajian budaya sekolah

SMA Kolese de Britto dalam Kajian Gerakan Sosial

Sebagian orang menganggap sekolah memiliki manfaat bagi kebaikan bersama, namun sebagian yang lain mulai skeptis terhadap eksistensi sekolah yang sarat dengan kepentingan kekuasaan tertentu. Di antaranya, keraguan tampak dalam sejumlah wacana yang ditawarkan buku-buku yang beredar luas di Indonesia seperti *Sekolah Itu Candu* (Topatimasang, 2007), *Dunia Tanpa Sekolah* (Ahsin, 2007), *Orang Miskin Dilarang Sekolah* (Prasetyo, 2004), dan *Selamat Tinggal Sekolah* (Pora, 2004). Kontroversi penting atau tidaknya sekolah bagi masyarakat masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dikaji. Pada satu sisi sekolah diyakini sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang, sedangkan di sisi yang lain tidak

sedikit yang mulai ragu dengan kebaikan sekolah di tengah kendali kekuasaan tertentu, baik negara, agama ataupun pasar.

Berangkat dari kegelisahan yang serupa, tulisan ini mencoba mengolah kembali apakah sekolah masih berpotensi memiliki peran penting bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Bila ya, di manakah letak potensinya dan sejauh mana kemungkinan peran sekolah bagi masyarakat bisa berjalan efektif di tengah tuntutan pragmatis negara, agama dan pasar? Salah satu upaya yang mungkin dilakukan untuk menjawab persoalan di atas adalah dengan menggali potensi sekolah sebagai sebuah gerakan sosial di mana praktik-praktik pendidikannya berimplikasi kebudayaan khususnya bagi pendewasaan masyarakat.

Semangat yang diharapkan muncul adalah ditemukannya ruang-ruang kemungkinan di mana entitas sekolah masih mampu memerankan dirinya sebagai sebuah gerakan kekuatan budaya di tengah wacana yang skeptis terhadapnya. Demi meraih semangat itu, penelitian ini mengangkat tema gerakan sosial sebagai salah satu wajah dalam kajian budaya (*cultural studies*). Dengan menggunakan kacamata gerakan sosial, penelitian mencoba memasuki wilayah studi yang lain, yaitu pendidikan sekolah. Dalam hal ini, peneliti hendak mengamati sekolah formal sebagai entitas sosial yang secara institusional dan sistematis memiliki visi, ideologi, serta misi selayaknya sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial dalam penelitian ini mengacu kepada teori Gerakan Sosial Baru (Laclau dan Mouffe, 2008) yang menitikberatkan perjuangan sosial dalam antagonisme-antagonisme yang tidak sekedar berurusan dengan persoalan kelas namun lebih kepada peraihan peran di tengah ketersebaran konflik sosial. Meletakkan sekolah sebagai gerakan sosial berarti mengandaikan bahwa sekolah terlibat dalam antagonisme sosial demi meraih posisi subjeknya di tengah hubungan pendidikan-kekuasaan yang cair. Antagonisme tersebut dapat dilacak dari cara sekolah memperjuangkan nilai-nilai melalui wacana dan praktik-praktik pendidikannya.

Dalam kerangka antagonisme, praktik pendidikan yang unik terjadi pada sebuah sekolah di Yogyakarta. Sekolah itu bernama SMA Kolese de Britto, atau sering disebut juga dengan SMA de Britto, atau SMA JB. Keunikan sekolah tersebut terlacak melalui praktik pendidikannya yang secara kasat mata berbeda dari sekolah-sekolah lain pada umumnya. Salah satu yang khas dari Kolese de Britto adalah mengenai pemaknaan nilai-nilai kebebasan dalam corak pendidikannya. Secara sekilas, SMA de Britto seolah-olah hendak membentuk pemahaman tertentu mengenai kebebasan di tengah masyarakat (Djoen, 1976). Kehendak tersebut merupakan sumber kekuatan transformatifnya untuk meraih sebuah realitas yang diinginkan.

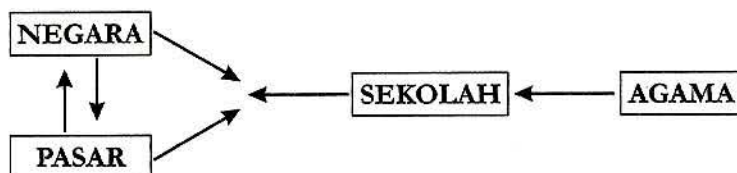
Secara khusus, persoalan yang mendasari penelitian berfokus pada potensi kekuatan transformatif yang masih memungkinkan dimiliki sekolah berbasis agama di tengah tuntutan kekuasaan negara dan pasar. Potensi tersebut harapannya akan ditemukan seiring dengan pembacaan yang mendalam atas kesejarahan sekolah (*historical view*) yang secara sinkronik hidup berdampingan dengan kekuasaan negara, agama dan pasar. Secara historis, penelitian akan meletakkan kajiannya pada kurun waktu 1960-2000 di mana kekuasaan negara, agama dan pasar mendominasi silih berganti.

Ada dua alasan kuat yang melatarbelakangi pemilihan rentang tersebut. Pertama, pada periode 1960-an, SMA Kolese de Britto atau SMA JB mulai menerapkan sebuah pola pendidikan yang mendasarkan elemen-elemen kebebasan dalam implementasinya di lingkungan sekolah. Dalam penerapan pendidikan bebas, SMA JB sebagai turunan organisatif ordo Serikat Yesus acap bertegangan dengan kekuatan negara dan pasar. Alasan yang kedua, masa 1960-1998 merupakan rentang yang representatif untuk menggambarkan dinamika kekuatan agama, negara dan pasar. Sebagai gambaran singkat, pada periode 1960-1966, tarik-menarik hubungan antara agama dan negara mengental hingga akhirnya berujung pada krisis politik di tahun 1965. Pada rentang 1966-1998, kekuasaan negara perlahan mendominasi dan cenderung memaksa agama untuk berkompromi. Pada tahun 1998, dominasi negara terjungkal oleh krisis ekonomi dan bertransisi ke dalam bentuk yang membuka ruang-ruang kebebasan yang baru. Terbukanya ruang-ruang kebebasan yang baru dimanfaatkan pasar untuk bergerak dengan cepat menguasai setiap lini kehidupan sosial. Pada tahun 2000, perubahan orientasi negara dan masyarakat yang terinternalisasi kepentingan pasar semakin nyata terlihat dan dirasakan terutama dalam tren gaya hidup konsumtif dan pencitraan diri.

Ada tiga indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sekolah menyimpan potensi sebagai sebuah gerakan sosial. Ketiganya diturunkan dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana sekolah (SMA Kolese de Britto) memerankan dirinya di tengah geliat tuntutan negara?
2. Bagaimana SMA Kolese de Britto memerankan dirinya di tengah perkembangan industri dan tuntutan pasar?
3. Bagaimana dinamika relasional antara institusi agama (Yesuit) dan sekolah (Kolese de Britto) dalam merespon intervensi kekuasaan negara dan pasar?

Letak persoalan yang hendak dibahas dalam penelitian ini secara umum dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:



Gambar 1. Pemetaan Awal Masalah

Sekolah Lelaki Gondrong Berbaju Bebas: SMA Kolese de Britto dalam Konteks Sejarah Sekolah Indonesia 1948-2000

Sebelum jauh melangkah kepada wacana pembahasan tersebut, baik bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu sosok Kolese de Britto. Kolese de Britto merupakan sebuah SMA khusus laki-laki yang membebaskan siswa-siswanya berambut panjang. Seperti layaknya kita pahami bahwa dalam keyakinan masyarakat, rambut gondrong bukan sesuatu yang begitu saja mudah dipahami ketika dimiliki oleh seorang anak sekolah berusia antara 15 sampai 17 tahun. Lebih mengejutkan lagi, siswa SMA Kolese de Britto diberikan kebebasan untuk mengenakan sandal dan berpakaian bebas di hari "S" (Senin, Selasa dan Sabtu). Sangatlah tidak umum dan melanggar kebiasaan ketika sekumpulan anak usia sekolah pergi belajar di pagi hari tanpa mengenakan seragam dan sepatu layaknya anak-anak yang lain.

Bagaimana kemudian citra Kolese de Britto di mata masyarakat? Masyarakat acap mencitrakan siswa SMA Kolese de Britto sebagai sekolah dengan tipologi siswa yang liar bahkan *urakan*. Sebagian besar masyarakat yang hidup dalam iklim keseragaman tentu cukup sulit untuk memahami mengapa Kolese de Britto menonjolkan keberbedaan. Drost dalam pemikirannya menyoroti penyeragaman sebagai biang pribadi yang tidak mandiri. "Kolektivisasi hanya dapat dicapai lewat penyeragaman fisik yang berakibat – lebih-lebih bagi kaum muda – penyeragaman cara mereka berpikir dan bertindak" (Drost, 1993: 34-35). Sementara ini, bisa disimpulkan bahwa idiom sosial yang ditawarkan oleh sekolah tersebut belum tercantum dalam kamus sosial masyarakat. Meskipun ada, maknanya masih samar.

Dalam observasi data, penulis menemukan bahwa masyarakat ternyata tidak seluruhnya menghakimi Kolese de Britto sebagai sekolah yang tak bermutu. Hal tersebut tampak dalam beberapa ungkapan yang menyatakan bahwa: "*ngglidhig ning mlethik*" atau "nakal tapi cerdas." Ungkapan tersebut seakan menyanggah ungkapan sebelumnya yang menempatkan siswa Kolese de Britto dalam ukuran normatif yang negatif. Sekali lagi, penulis menemukan oposisi biner atas wacana

Kolese de Britto di mata masyarakat. Di satu sisi mereka menyangkal, namun di sisi yang lain mereka memuji.

Mengapa SMA Kolese de Britto menyimpan beragam citra (baik pro ataupun kontra) di tengah masyarakat? Dalam setiap zamannya, SMA Kolese de Britto membangun kebijakan yang "kontroversial" bagi para siswanya. Kontroversial dalam hal ini dimaksud untuk menggambarkan sifat dari kebijakan yang keluar dari jalur logika formal masyarakat, namun di sisi yang lain, kebijakan tersebut memiliki nilai membenaran moralitas.

Sebagai contoh, hampir di setiap zamannya SMA Kolese de Britto tersohor sebagai sekolah yang berani mengeluarkan siswanya dalam jumlah yang besar sebab tidak memenuhi standar nilai prestasi yang ditetapkan. Tujuan moral dari prinsip tersebut bukanlah sebagai upaya untuk sekedar meningkatkan mutu sekolah, namun lebih sebagai penanaman nilai penerimaan diri secara jujur. Justru dari kegagalan dan ketidakmampuan tersebut siswa diajak untuk tidak membencinya namun mencintainya sebagai bagian dari dirinya. Menjadi tak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat bukan berarti melacurkan diri untuk memakai topeng kepalsuan berupa prestasi ataupun penampilan. *Kuwalik* (terbalik) namun diyakini baik, itulah yang diyakini baik oleh para siswa, alumnus maupun masyarakat.

Tujuan moral dalam kasus di atas tidak bisa dilepaskan dari agenda Yesuit. Hal itu tampak dari tulisan St. Kartono, guru Kolese de Britto yang mengakui penggunaan "dinamika Latihan Rohani: pengalaman-aksi-refleksi" di balik kegiatan-kegiatan pembelajaran di de Britto (Kartono, 1999: 14-15). Drost, seorang Yesuit pemikir pendidikan juga menuliskan pola Latihan Rohani dalam konteks yang lain, bahwa "proses mendidik dan mengajar anak, bahkan lebih-lebih orang dewasa, seharusnya berlangsung sebagai berikut: pengalaman-refleksi-kegiatan" (1993: 25). Latihan Rohani sendiri merupakan karya Santo Ignasius, pendiri Yesuit; pola Latihan Rohani ini menjadi ciri khas setiap lembaga milik Yesuit. Para Yesuit menyebutnya sebagai visi Ignasian (Serikat Yesus, 1987: 5).

Lepas dari itu semua, masyarakat masih meminati dan mempercayakan anak-anaknya untuk masuk dalam dunia yang "main-main" dan *kuwalik*. Kemungkinan besar minat tersebut hadir dikarenakan *distingsi*¹ dan oposisi-oposisi yang terkandung di balik citra SMA Kolese de Britto. Baik dari siswa maupun alumnusnya, masyarakat beranggapan bahwa Kolese de Britto bukan institusi pendidikan yang

1 Istilah ini sangat lekat dengan "distingsi" dalam pemikiran Bourdieu yang diarahkan untuk meraih status yang bersifat simbolik di tengah relasi kekuasaan (1984: 246-254). *Distingsi* itu berulang secara sistematis sebagai *habitus* dan *life style* di SMA Kolese de Britto demi membedakan dirinya dari yang dominan. Implikasi ekonominya, Kolese de Britto masih memiliki peminat yang besar.

sekedar “main-main” meski tentu “main-main” itu sendiri menyimpan suatu tindakan kreatif. Tindakan kreatif tersebut penulis asumsikan sebagai sebuah strategi yang sengaja² dikonsepkan oleh institusi Kolese de Britto sebagai upaya mencapai suatu visi yang sangat erat kaitannya dengan persoalan sosial yang hendak diubah.

Bagaimana keberbedaan ditanamkan dalam proses pendidikan SMA Kolese de Britto, dan apa yang mendasari strategi itu? Slogan-slogan nilai humaniora dan prinsip kebebasan dihidupkan dan dipertahankan dari generasi ke generasi secara sama namun dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, “Bebas Bertanggung Jawab,” “*Man for Others*” (manusia bagi sesama), “*Ad Maiorem Dei Gloriam*” (Bekerja Sebaik-baiknya demi Kebesaran Nama-Nya), dan “Tidak Takut-Tidak Malu-Tidak Malas.” Baik melalui ciri khas penampilan maupun slogan-slogan yang dihidupkan terus, siswa SMA Kolese de Britto membangun identitas diri sebagai pribadi yang berbeda dari kebanyakan. Identitas ke-de Britto-an kemudian tersimpan maupun disimpan baik dalam memori para siswanya maupun alumnusnya.

Wacana Pendidikan Bebas versus Wacana Pendidikan Nasional

Negara membangun sistem pendidikannya dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Kecerdasan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari kepentingan kolektif untuk menjaga keberlangsungan sebuah negara di tengah berbagai macam tantangan yang berubah di dalam dan luar sebuah negara. Pada tahap tersebut negara membutuhkan hadirnya sekolah sebagai instrumen pembentukan anak muda menjadi pribadi yang “berguna” bagi kepentingan masyarakat. Kata “berguna” merupakan konsekuensi kolektif atas hadirnya negara yang dihidupi kebenaran normatif atas idealisme kemanusiaan, menyangkut nilai-nilai kedisiplinan, kepatuhan dan moralitas kesusilaan. Kata ini juga lekat dengan ideologi pembangunan dan politik nasionalisme yang meletakkan warga negara sebagai alat kemajuan bangsa dan negara terutama secara ekonomi. Dengan kata lain, negara seolah bertugas memperadatkan manusia untuk akhirnya mencapai imajinasi kolektif.

Bila digali kembali, nilai-nilai kedisiplinan, kepatuhan dan moralitas kesusilaan menjadi titik berangkat dalam setiap upaya pendidikan yang dijalankan oleh negara selain meraih kecerdasan warganya. Penekanan ketiga nilai normatif tersebut pada masa tertentu begitu berlebihan hingga menjadi paham *mainstream*. Bentuk pendidikan *mainstream* lebih mengutamakan pembentukan manusia

2 “Sengaja” maksudnya adalah bahwa setiap perilaku *kuwalik* tersebut disadari pelakunya. Pendapat penulis dipengaruhi oleh Giddens yang meletakkan aksi reflektif sebagai strategi yang diketahui oleh pelakunya sebagai strategi (*symbolic struggle* dalam istilah Bourdieu) di tengah struktur sosial yang dominan dan cenderung seragam (Giddens, 1986:16-28, 41-44).

yang adiluhung (mirip dengan aliran humanisme klasik yang kerap meletakkan pendidikan secara esensialis³ dan fungsionalistik⁴) di mana seluruh logika pendidikannya berkuat pada mekanisme produksi manusia muda yang cerdas, disiplin, patuh dan bermoral. Moralitas dalam pengertian ini tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan kategorisasi perilaku normal-abnormal, dosa-tidak dosa, dan susila-asusila yang diinternalisasi dalam diri kaum muda baik secara indoktrinatif maupun persuasif.

Proses melepaskan diri dari kanon pendidikan yang hidup di luar diri SMA Kolese de Britto menjadi proses agenisasi politis sekolah ini yang justru hidup di tengah wacana pendidikan yang sarat pembatasan perilaku. Hal itu dimungkinkan terjadi karena titik berangkat ideologis SMA Kolese de Britto dalam menerjemahkan kebutuhan pendidikan tidak seluruhnya menyepakati aliran pendidikan yang dianut oleh negara. Titik pertemuan antara negara dan agama di wilayah pendidikan kerap melahirkan hubungan yang kompleks terutama ketika masing-masing memiliki keinginan untuk merepresentasikan gagasannya pada pembentukan identitas kaum muda. Gagasan pendidikan yang lahir dari wilayah politis negara dan religiositas agama kerap tidak beriringan karena masing-masing berangkat dari kesejarahannya sendiri.

Sejauh mana sekolah masih memiliki ruang yang otonom untuk menjalankan fungsi ideologisnya terutama dalam membaca realitas? Mempelajari sejarah SMA Kolese de Britto pada tahun 1963, sebuah sekolah sesungguhnya memiliki kemampuan potensial untuk mengembangkan perilaku pendidikannya secara otonom sebagai respon terhadap realitas material hasil pembacaannya sendiri. Pendidikan bebas sebagai sebuah ide yang mulai dimunculkan pada 1960-an sama sekali bukan manifestasi dari ideologi pemikiran yang ada sebelumnya karena justru pada tahun 1948 hingga awal 1960, SMA Kolese de Britto menerapkan pola pendidikan konvensional layaknya sekolah-sekolah Katolik yang hidup pada masa itu.⁵ Ide pendidikan bebas lahir dari gagasan para guru non-biarawan yang hidup di tengah masyarakat dan merasakan langsung bagaimana kemiskinan di tahun 1963-1965 telah membatasi kesempatan banyak siswa untuk bersekolah.

Determinasi wacana pendidikan *mainstream* yang dianut negara dan masyarakat terutama dalam memaknai realitas kebutuhan anak muda ternyata

3 Aliran pemikiran yang meletakkan pendidikan sebagai sesuatu yang seolah *taken for granted* dan bersifat netral dari semula.

4 Aliran pemikiran yang meyakini bahwa satu-satunya alasan eksistensi pendidikan adalah kegunaannya secara pragmatis.

5 Disimpulkan dari tulisan Koelman (1978) dan wawancara dengan dua alumni yaitu G. Sukadi, mantan siswa periode 1962-1965 dan pernah menjadi guru 1968-1981 (16 Agustus 2011) dan Th. Aq. Sunarto, mantan siswa periode 1959-1962 (18 Maret 2011).

tidak selalu mampu mengonstruksi identitas, selera dan pola pembacaan para guru SMA Kolese de Britto. Perilaku kekuasaan yang membatasi ternyata memuat pula berbagai kemungkinan munculnya kontra-wacana secara anomali. Meminjam pemikiran Laclau dan Mouffe, identitas sosial bersifat kontingen (*contingent*), karena dibentuk oleh keadaan di luar dirinya yang justru memunculkan sejumlah kemungkinan kreatif. Kontingensi merupakan gugus kondisi yang memberi kemungkinan (*possibility*) sekaligus juga pembatasan (*finitude*). Momentum masa 1960-an menjadi awal bagi berkembangnya pendidikan bebas di tengah pembatasan dari sebetuk ide menuju bentuk wacana yang kreatif.

Teks mengenai peran sekolah bagi kaum muda menjadi arena pertarungan negara dan Kolese de Britto dalam interpretasi ideologisnya masing-masing. Negara meletakkan sekolah dalam peran esensial yang sarat akan kepentingan politik (menciptakan generasi yang sadar hukum dan cinta tanah air) dan ekonomi (menciptakan generasi yang berketerampilan dan siap kerja). Kolese de Britto tidak menentang seluruh hasil pembacaan negara atas pendidikan, namun mencurigai hal-hal tertentu yang mengindikasikan ketidakseimbangan makna, terutama berkaitan dengan penghargaan atas hak individu di hadapan tuntutan kolektif masyarakat. Pada suasana semacam itulah, sekolah ini membangun wacana sendiri yang secara positif bersifat hegemonik.

Meminjam pemikiran Laclau dan Mouffe, "logika hegemoni sejak awal hadir sebagai sebuah operasi yang bersifat komplementer dan kontingen, yang memang dibutuhkan karena ada ketidakseimbangan-ketidakseimbangan konjungtural dalam sebuah paradigma evolusioner, dan validitas esensial atau morfologisnya tak pernah diragukan kebenarannya" (2008: xi). Baik negara maupun Kolese de Britto memproduksi wacana pendidikan yang berbeda sekaligus mengandung beberapa kesamaan. Sekolah mewacanakan pendidikan bebas sebagai jawaban terhadap ketidakseimbangan konjungtural atas wacana pendidikan nasional yang pada masa itu bersifat *mainstream* dan tak pernah diragukan kebenarannya. Dengan kata lain, pola pendidikan bebas dan pola pendidikan nasional masing-masing bersifat komplementer dan mengisi ketidakseimbangan konjungtural yang dalam hal ini berangkat dari paradigma esensial yang berbeda. Negara berangkat dari esensialisme perenial politis, sedangkan sekolah berangkat dari esensialisme humanistik yang disemangati oleh kristianitas. Inilah pertarungan yang terbaca antara sekolah dan negara.

Esensialisme dan Perenialisme merupakan dua aliran filsafat yang berbeda dalam memaknai manusia dan pendidikan, namun secara politis acap digunakan negara secara bersamaan karena keduanya merujuk pada kembalinya nilai-nilai

luhur warisan masa lalu sebagai satu-satunya penjamin kepastian dan stabilitas. Esensialisme modern dan perenialisme sama-sama tumbuh menentang skeptisisme dan sinisme yang dioperasikan oleh gerakan progresif yang menganggap bahwa kebenaran tidak ditentukan dalam dan dengan pengetahuan masa lalu melainkan diraih melalui eksperimen sebagai penanda atas kemajuan. Dalam bidang pendidikan, negara menerapkan esensialisme perenial dengan memperlakukan sekolah sebagai lembaga pewaris kebenaran nilai-nilai luhur masa lalu melalui pendekatan kedisiplinan perilaku yang ketat dan pengawasan yang berkesinambungan demi pembentukan masyarakat yang stabil. Kemajuan, kebebasan dan perubahan harus dikembalikan pada pemaknaan kebudayaan masa lalu yang *adiluhung* dan bersifat pasti sehingga tidak merusak kemapanan dan *keaslian* sebuah bangsa.

Berbeda dengan *classical humanism* sebagai nama lain dari *essensialism*, esensialisme humanistik yang diterapkan di Kolese de Britto, menurut penulis, sangat lekat dengan hibridisasi esensialisme teologis (anti-progresivisme) dan liberalisme populer (pada 1960an-1970an banyak dikampanyekan oleh gerakan *Hippy* di Amerika) yang menempatkan kebebasan individu sebagai sesuatu yang terberi (*given*) dari Tuhan dan harus diperjuangkan dalam pendidikan. Fungsi dari pendidikan sendiri selanjutnya adalah mengembalikan kebebasan individu sebagai hakikat manusia.

Membaca Jejak Hegemonik Wacana Pendidikan Bebas

Apakah pendidikan bebas menjadi simbol perlawanan atas hegemoni negara yang menjalar dalam wacana kebenaran atas pendidikan? Wacana pendidikan bebas menjadi senjata ideologis dalam tafsir mengenai posisi esensial sekolah bagi kaum muda dan terus direproduksi dari masa 1960-an hingga 2000. Reproduksi wacana pendidikan bebas seolah mengandung kebenaran yang tidak diragukan dan terus dimanifestasikan dalam berbagai penafsiran atas peristiwa hidup baik secara kolektif maupun individual, di dalam dan luar sekolah. Hegemoni wacana pendidikan bebas bukan lagi bagian dari ideologisasi yang "berdosa" karena, meminjam pemikiran Gramsci, Laclau dan Mouffe, hegemoni justru berfaedah sebagai sebuah instrumen dalam gerak perjuangan demi pencapaian demokrasi yang radikal, libertarian dan plural (Laclau dan Mouffe, 2008: xxvii).

Persoalan muncul ketika hegemoni sekolah harus berhadapan dengan intervensi hegemonik negara lewat kurikulum nasional yang secara ideologis mengandung format pendidikan tertentu. Suasana birokratis ala negara yang hidup di lingkungan manajerial pendidikan menimbulkan kondisi-kondisi diskursif bagi tumbuhnya suatu aksi kolektif di dalam sekolah. Secara kolektif, diskursus

diarahkan pada sebuah perjuangan untuk mengkritisi ketimpangan dan tantangan atas relasi-relasi subordinatif yang dibangun negara. Negara yang mengusik kebebasan siswa dalam berpenampilan menjadi titik berangkat wacana diskursif mengenai pendidikan bebas. Mengintegrasikan pemikiran Laclau dan Mouffe dalam penelitian ini, antagonisme yang dibangun sekolah melawan negara menjadi sebuah *political frontier* yang memicu pertarungan hegemonik antara pendidikan bebas dan pendidikan nasional.

Salah satu saluran hegemonik yang digunakan dalam pewacanaan pendidikan bebas dari tahun ke tahun adalah melalui proses simbolisasi peristiwa. Sebuah perjuangan dalam lingkup gerakan membutuhkan simbol yang terkadang bersifat monumental-material. Simbol itu difungsikan sebagai alat reproduksi ideologi tertentu dari zaman ke zaman. Momentum penolakan pada kewajiban berseragam dan kebebasan berambut gondrong bergeser dari sebuah sikap pendidikan pada tahun 1960-an yang bertujuan merespon kemiskinan, menuju pada sebuah simbolisasi perjuangan yang terus ditonjolkan melalui berbagai cerita di lingkungan sekolah pasca 1970-an hingga tahun 2000.

Lambat laun fungsi simbol berubah menjadi penanda pembeda dengan sekolah yang lain atau bahkan masyarakat. Simbol "cah JB" atau "eks-JB" pulalah yang memproduksi "I" atau "we" dalam komunitas Kolese de Britto dalam menegaskan diri yang berjarak dari "they" sebagai sebutan bagi sekolah yang lain atau masyarakat. Simbol, baik dalam bentuk cerita mengenai romantisme masa lalu, penampilan ataupun sikap, menjadi alat pemersatu yang rujukannya (*reference*) pada keinginan kolektif bagi individu-individu di sekolah ini dalam perjuangannya yang bersifat defensif (merujuk pada transformisme bukan ekspansif)⁶ terhadap wacana pendidikan nasional. Disebut defensif karena perjuangan komunitas tidak diarahkan pada upaya massa merevolusi sistem pendidikan nasional secara melebar melainkan sekedar merestorasi perilaku absolut negara secara parsial (hanya beroperasi pada wilayah komunitas Kolese de Britto) melalui pembentukan konsensus yang pasif (tidak merembes pada strategi ofensif untuk memobilisasi massa menentang negara) demi menetralsir (tidak merombak) kekuatan politik antagonistik negara.

Penegasan diri sebagai yang berbeda melalui segala perilaku yang cenderung antagonistik dalam praktik pendidikan Kolese de Britto bukan tanpa alasan. Gondrong, gemar *misuh* (mengumpat), hingga berlaku seperti anak muda yang liar menjadi jalan untuk membangun identitas kolektif. Identitas kolektif sendiri tidak

6 Gramsci membedakan dua bentuk hegemoni: transformisme dan ekspansif. (Hutagalung, 2008: xxvi)

dapat lagi distabilkan dalam pemaknaan utuh dari suatu *system of difference* atau melalui cerita-cerita masa lalu mengenai pembeda antara sekolah ini dan sekolah lain yang tunduk pada *mainstream* negara. Identitas dihidupkan justru melalui tindak subjek (anak muda) yang antagonistik, yang dikontestasikan setiap waktu oleh kekuatan yang berdiri di luar sekolah. Identitas menurut Mouffe (2005: 15, 75) akan memicu penciptaan "kita" yang hanya ada ketika disandingkan dengan "mereka," "*good and evil*," atau dalam kasus ini, SMA "JB" dan SMA "negeri."

Wacana pendidikan bebas pada tahun 1970-an hingga 1990-an sarat dengan sifatnya yang hegemonik untuk menjawab dominasi ideologis negara mengenai moralitas kaum muda. Pola hegemonik wacana pendidikan bebas muncul ketika elemen partikular mampu mengonstruksi tuntutan pribadi-pribadi di lingkungan Kolese de Britto menjadi bersifat universal. Kebebasan yang sarat interpretasi filosofis kristianitas, kemudian disodorkan sebagai sebuah keniscayaan universal mengenai penghargaan kepada hak bebas manusia. Keseluruhannya berangkat dari esensi manusia sebagai ciptaan Allah yang dianugerahi kebebasan.

Pembatasan ruang lingkup pendidikan di sekolah oleh negara tidak selalu mampu menghentikan perjuangan sekolah untuk meraih ruang yang otonom. Justru hegemoni negara memicu kreativitas para subjek di sekolah dalam mengonstruksi wacana *counter-hegemony*. Wacana pendidikan bebas terus menemukan bentuknya sepanjang sejarah kekuasaan negara masih beroperasi. Semakin kuat pembatasan yang dijalankan oleh negara, semakin subur kemampuan sekolah dalam menemukan strategi ideologisasi wacana antagonisme. Bahkan dalam beberapa peristiwa, wacana yang hidup di sekolah menemukan titik *equivalences* dengan wacana antagonisme lain yang diproduksi entitas sosial di luar sekolah yang jauh di luar lingkup pendidikan. Dalam suasana yang sarat resistensi dan antagonisme, terbentuklah *chain of equivalence* atau jalinan kesamaan antara Kolese de Britto dan kelompok sosial lain yang mengalami opresi negara atau yang memiliki kehendak sama.

Antara Kolese de Britto dan negara terdapat *political frontier* yang memisahkan keduanya. Keduanya berjalan dalam kehendak masing-masing bagi arah pendampingan kaum muda meskipun tidak selalu berhadap-hadapan dalam totalitas konflik. Dalam peristiwa dan konteks sosial di luar pendidikan, negara juga membangun *political frontier* dengan masyarakat melalui suatu tipologi kepemimpinan yang opresif. Dengan suasana masyarakat yang semacam itu, komunitas SMA Kolese de Britto justru menemukan keleluasaan gerak wacana pendidikan bebasnya sebagai bagian dari universalisasi tuntutan melalui berbagai kesamaan (*equivalences*). Meminjam istilah Laclau (2005: 130), "inilah gerak hegemonik yang sempurna."

Pembentukan Identitas Kaum Muda di Tengah Pasar: Terpecah atau Aktual

Peristiwa politik 1998 memicu desentralisasi kekuasaan negara, sekaligus memberi ruang bebas kepada sekolah untuk langsung berhubungan dengan industri. Di samping itu, hembusan otonomi daerah menuntut pemindahan kekuasaan birokratis pendidikan dari pusat (Jakarta) ke pemerintah daerah secara non-vertikal. Untuk menegaskan pola desentralisasi pendidikan, pada perkembangan selanjutnya, regulasi pendidikan mulai menyertakan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai pendamping berjalannya kurikulum 2004. Dalam pendekatan MBS, sekolah ditetapkan sebagai institusi otonom yang berkoordinasi bersama dinas pendidikan dasar dan menengah di tingkat daerah. Sekolah mulai memiliki kewenangan yang besar untuk memutuskan orientasi dan keputusan-keputusan pendidikannya.

Pergulatan vertikal antara kepentingan negara dan sekolah mulai bergeser ke dalam pertarungan horizontal antara tuntutan masyarakat (*public needs*) dan ideologi sekolah. Ideologi sekolah harus berhadapan dengan pragmatisme sosial yang berangkat dari meningkatnya jumlah pengangguran, melonjaknya angka kemiskinan di tengah persaingan ekonomi, dan tumbuh suburnya pola hidup konsumtif masyarakat. Bilamana sekolah tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang pragmatis, sekolah terancam bangkrut akibat kehilangan peminat. Pengambilan keputusan pendidikan semakin kompleks karena pragmatisme bukan bagian dari kekuasaan eksternal melainkan justru berasal dari pergulatan pribadi-pribadi subjek di dalam sekolah itu sendiri.

Pergulatan internal mau tidak mau harus dihadapi oleh guru, karyawan, dan segenap administrator pendidikan di Kolese de Britto pasca 1998 justru ketika sekolah harus memutar otaknya untuk menemukan siasat bertahan di tengah persaingan. Sekolah mau tidak mau mulai menerapkan strategi ekonomi pemasaran, promosi, iklan, imaji untuk bertahan. Dalam diri subjek sendiri akhirnya terjadi tarik-menarik kekuatan antara mempertahankan idealisme pendidikan atau kehendak *mainstream* yang membuka ruang-ruang komodifikasi pendidikan dalam ranah interaksi antar sekolah.

Di hadapan negara, sekolah mencapai keinginannya meraih otonomisasi yang diperjuangkan setidaknya sejak tahun 1963. Di sisi yang lain, pasca 1998, sekolah hidup dalam rimba persaingan bukan saja dengan sekolah swasta yang lain, namun berhadapan dengan sekolah negeri yang mulai menjalankan praktek RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Satu-satunya kemungkinan untuk bertahan adalah mengubah gaya lama dalam mengatur berjalannya pendidikan di Kolese de Britto. Meski tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan sendiri, namun

beberapa hal mulai diakomodasikan terutama berkaitan dengan kepentingan pasar. Spesialisasi dan penjurusan bidang ilmu mulai dikuatkan sebagai bagian dari upaya memproduksi pribadi-pribadi yang kuat secara intelektual dan keterampilan.

“Apakah SMA Kolese de Britto mampu memerankan dirinya sebagai agen kritis⁷ di tengah perkembangan industri dan perluasan pasar?” Peran kritis SMA Kolese de Britto ditunjukkan pada upayanya untuk tidak tersedot masuk dalam pekatnya kubangan persaingan antar sekolah. Di tengah perubahan masyarakat yang mudah tergoda oleh pembangunan gedung sekolah yang megah, komunitas guru di Kolese de Britto justru menghindari dari jerat banal terengah-engahnya mayoritas sekolah memenuhi modalitas finansialnya untuk pembangunan. Pergulatan para guru ini terlihat dalam kisah-kisah reflektif yang mereka kumpulkan dalam buku *Banyak Jalan menuju LA 161* (2008). Dalam berbagai kisah tersebut ditampilkan, meski secara halus, kegelisahan para guru di balik kata “melayani” yang populer di komunitas guru de Britto. Kegelisahan itu muncul ketika dalam praktik keseharian mengajar, mereka harus pula hidup dalam godaan hasrat ekonomi sekaligus menjaga orientasi spiritual lingkungan kerja yang berkebalikan dengan hasrat tersebut.

Peran sebagai agen kritis yang dijalankan Kolese de Britto tidak saja digunakan untuk merespon gengarnya ideologisasi pasar pada wilayah kurikulum atau godaan untuk masuk dalam pusaran persaingan antar sekolah. Peran kritis ini juga diarahkan pada tumbuhnya wacana pendidikan yang mengandung sentimen terhadap peran sekolah di tengah pasar. Ketika banyak wacana kritik pendidikan dikuasai oleh pola pembacaan yang kental determinasi ekonomi dan isu-isu mengenai tingginya biaya pendidikan, Kolese de Britto justru berupaya menciptakan nuansa lingkungan pergaulan guru yang memanfaatkan perubahan masyarakat oleh pasar. Sekolah berupaya menerjemahkan ulang *positioning* pendidikan bebas di tengah persoalan ekonomi yang masih dirasakan krusial bagi para guru muda yang nantinya menjadi masa depan SMA Kolese de Britto.

Makna hidup dan kerja bergeser, bukan lagi persoalan ekonomi, namun hasrat dan selera. Salah satu sifat gerakan sosial yang hidup di SMA Kolese de Britto pada pasca tahun 2000 adalah kemampuannya menggeser wacana monopretatif mengenai determinisme ekonomi yang bersifat *mainstream* di masyarakat kepada

7 Pedagogi kritis merupakan tawaran yang dihadirkan Tilaar (2005). Pemikirannya berangkat dari pemikiran Giroux mengenai nihilnya peran subjek sekolah di tengah bahasa pasar. Untuk meraih peran sosialnya (sebagai agensi kekuatan budaya), sekolah idealnya memiliki kekritisannya dan posisi tawar dalam pertemuan-pertemuan pendidikan (*educative encounters*) yang sarat tuntutan pasar dan industri. Pada tahap ini sekolah menjadi peka kepada *hidden curriculum* yang digelontorkan oleh negara dan pasar.

wacana *desire* (hasrat) eksistensial manusia yang lapar mengkonsumsi *image* atas dirinya. Di tengah keseragaman wacana pendidikan yang berhenti pada pergulatan esensialisme dan ekonomisme, para guru dan siswa Kolese de Britto justru menghindar dan menyibukkan diri pada pembentukan diri yang dirayakan melalui kebebasan “untuk menjadi.” Penggarapan komunitas siswa yang didampingi oleh guru-guru yang berminat pada bidang-bidang seperti karya tulis, pembuatan film dokumenter, fotografi, teater, pecinta alam dan seni rupa menjadi bagian dari kesibukan para guru dan siswa dalam mengeksploitasi hasrat eksistensial di tengah pasar. Hasrat eksistensial komunitas Kolese de Britto diberi ruang bebas bukan dalam rangka menguatkan *image* distingtif di tengah arena sosial pergaulan antar sekolah, namun lebih untuk meraih kepuasan di tengah kerja. Pola tersebut tidak bersifat negatif karena justru menjadi bagian dari perlawanan komunitas De Britto untuk mengelak dari wacana monopretatif pendidikan yang cenderung mendiktekan kepentingan ekonomi dan developmentalisme sebagai sumber energi pendidikan.

Spiritualitas sebagai Siasat Ideologis

Spiritualitas Ignasian tidak bisa dilepaskan dari wacana pendidikan bebas di Kolese de Britto. Sebagai sebuah lembaga milik para Yesuit, SMA Kolese de Britto menafsirkan realitas menurut cara pandang spiritualitas warisan Santo Ignasius yang merupakan pendiri Serikat Yesus. Menempatkan spiritualitas Ignasian sebagai instrumen pembacaan atas realitas kemiskinan menjadi awal lahirnya pendidikan bebas di tahun 1960-an.

Meskipun spiritualitas tidak bisa diartikan sebagai ideologi karena keduanya hidup dalam ranah yang berbeda, namun dalam praktek pendidikan kolese, spiritualitas kerap dipergunakan oleh para subjek di SMA Kolese de Britto untuk membahasakan realitas politik dan sosial. Dalam hal ini, wacana pendidikan di sekolah-sekolah milik institusi agama, dalam bentuk yang tertulis maupun tidak, banyak berbicara mengenai kebebasan dalam bahasa yang agamis. Sebagai contoh, dalam wacana pendidikan bebas ada sebuah keyakinan bahwa kebebasan merupakan anugerah Allah kepada manusia yang menjadikan manusia sebagai manusia atau dalam istilah Driyarkara disebut sebagai manusia yang seutuhnya. Segenap pendidik yang telah dewasa dalam imannya bertugas mendampingi para siswa untuk bertumbuh menuju pribadi yang dewasa oleh karena kebebasan. Bukan ketakutan, keterpaksaan dan ketertindasan yang menggerakkan anak muda menjadi dewasa namun kebebasan dalam pilihan-pilihan hidupnya. Keseluruhannya menjadi bagian yang banyak diolah oleh para Yesuit dalam Latihan Rohani Ignasian.

Spiritualitas yang diterapkan di SMA Kolese de Britto tidak berhenti pada kebenaran-kebenaran yang sama dari satu rentang waktu ke rentang waktu yang lain. Ketika negara sensitif dengan wacana-wacana kebebasan yang dianggap mengganggu stabilitas nasional, SMA Kolese de Britto mulai gencar membalut wacana pendidikan bebas dengan spiritualitas keagamaan. Namun dalam perkembangan waktu, kebenaran dalam spiritualitas mulai kembali ditafsirkan berbeda ketika negara melemah pasca 1998 oleh kentalnya kekerasan dan konflik horizontal beralas agama dan ras.

Wacana pendidikan bebas sebagai reproduksi spiritualitas Ignasian bukan benda mati yang tergeletak pada posisi yang sama dan mengandung pemaknaan yang sama dalam setiap rentang waktu perjalanannya. Peran subjek penafsir menentukan arah dan orientasi berjalannya pendidikan bebas. Subjek sebagai pembaca menentukan bagaimana wacana hendak diposisikan dan dimaknai. Tidak lagi penting bagaimana gagasan pendidikan sesungguhnya dimaksudkan, begitu wacana terlepas dalam rentang zaman yang berbeda, kuasa penuh dimiliki pembacanya. Itulah mengapa, wacana pendidikan bebas memiliki cara yang berbeda dalam menjawab pertanyaan yang sama di dua rentang waktu yang berbeda.

Struktur kekuasaan yang hidup di sekitar subjek menentukan bagaimana teks difungsikan. Kekuasaan di luar diri subjek membentuk selera dan kebutuhan subjek yang berbeda pada tipologi kekuasaan yang berbeda pula. Kekuasaan negara dan pasar dalam rentang waktu yang berbeda membangun cara bagaimana wacana pendidikan bebas direproduksi untuk meresponnya. Semakin kuat sensor dari kekuasaan, semakin kreatif wacana membangun nilai politis dan strategisnya untuk menghindari dari citra subversif.

Membicarakan pendidikan di negara dan masyarakat Indonesia tidak mungkin mengabaikan aspek agama semenjak ketuhanan menjadi legalitas pada wilayah sosial, budaya, dan pendidikan. Kondisi semacam itulah yang digunakan oleh pelaku pendidikan di Kolese de Britto untuk menghindarkan wacana pendidikannya dari jerat tuduhan subversif. Perlawanan yang terkandung dalam wacana pendidikan bebas bersembunyi di balik spiritualitas, wilayah yang dipandang seolah-olah netral dan steril dari kehendak berkuasa. Untuk menampakkan dirinya "sesuai dengan koridor" yang diharapkan negara, wacana pendidikan bebas dimodifikasi untuk tidak melegalkan segala bentuk kebebasan yang berlawanan dengan negara.

Kebebasan berpenampilan (tidak seragam) tidak lagi diletakkan sebagai pilar pemaknaan wacana pendidikan bebas. Kecenderungan tersebut, menurut penulis, bukan diartikan sebagai upaya memangkas kebebasan namun sebagai upaya strategis di hadapan segala kemungkinan pembatasan ruang pada kebebasan-

kebebasan yang lain. Kolese de Britto tetap menampilkan tipologi yang unik dibanding sekolah-sekolah lain, sambil menjaga perilakunya agar tidak berhadapan langsung dengan kuasa negara sebagai otoritas penentu.

Di tengah kuatnya kekuasaan negara pada dasawarsa 1970-an hingga 1998, spiritualitas digunakan sebagai landasan orientasi para pendidik dalam pendampingan siswa yang akrab oleh ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang dilakukan negara. Meskipun demikian, pendampingan itu tidak secara vulgar mengarahkan para siswa untuk melawan negara. Pendidikan bebas menolak untuk dikategorikan sebagai konsep bahkan ideologi karena sifat pendidikan bebas tidak dogmatis dan mengarahkan. Pada sisi yang lain, wacana pendidikan bebas yang disemangati slogan "*option for the poor*" mengondisikan para siswa untuk memahami dan bersikap kritis terhadap ketidakadilan di sekitarnya. Kemenduaan ini bukan ketidaksengajaan atau kegagalan karena justru membuat tipologi dan kebijakan pendidikan di SMA Kolese de Britto sulit untuk disensor.

Pendidikan bebas bukan spiritualitas perlawanan karena dalam tafsiran para guru maupun mantan guru, wacana pendidikan di De Britto bukan bagian dari upaya perlawanan pada negara dan pasar. Bahwa perlawanan menjadi imbas dari sebuah suasana yang membebaskan mungkin bisa dibenarkan, namun mengarahkan pendidikan bagi anak muda untuk melawan bukan merupakan tujuan. Penegasan diri semacam itu berimbas pada kian luasnya Kolese de Britto dalam menggunakan wacana pendidikan bebas karena basis spiritualitasnya yang steril. Bahkan kalaupun akhirnya menyerempet otoritas berkuasa, keseluruhannya bukan dijadikan motif dari sebuah tindakan atau perilaku resisten melainkan "efek samping" dari spirit religius.

Di tengah-tengah pusaran persaingan antar sekolah, suasana pragmatisme yang dihadapi oleh para pelaku pendidikan telah membangun kompleksitas secara personal bagi tiap subjek dalam membaca wacana pendidikan yang selama ini mengakar di Kolese de Britto. Termasuk di dalamnya adalah pergulatan para guru yang hidup di tengah hegemoni pasar. Kebutuhan yang terus bertambah mendesak para guru untuk berjuang mempertahankan keyakinannya meskipun tidak sepenuhnya tercukupi. Refleksi para guru di sekolah menjadi catatan-catatan kecil mengenai pergulatan pribadi guru di tengah struktur kuasa pasar yang menjepit namun juga menggoda.

Dalam buku *Menuju LA161* (2008)⁸ yang berisi kumpulan tulisan reflektif yang menggambarkan dinamika pergulatan pribadi para guru Kolese de Britto

8 L.A. 161 adalah singkatan dari nama jalan tempat lokasi SMA Kolese de Britto, yaitu Laksda Adisucipto No. 161 Yogyakarta.

di tengah kebutuhan ekonomi, penulis menemukan berbagai penguatan pribadi melalui pemaknaan spiritualitas dalam setiap teks yang ditulis. Hal itu menunjukkan bahwa di tengah kemelut antara idealisme karya dan pragmatisme kebutuhan hidup, para guru memanggil penafsiran religiusnya dalam membahasakan problem yang dihadapinya. Penafsiran itu tidak jauh dari spiritualitas Ignasian yang menjadi titik berangkat berjalannya wacana pendidikan bebas di SMA Kolese de Britto. Spiritualitas Ignasian digunakan untuk membantu mengolah diri berhadapan dengan begitu banyak alternatif pilihan. Mulai dari pilihan yang benar-benar dibutuhkan hingga pilihan pada sesuatu yang seolah-olah dibutuhkan. Kekuatan religius merasuk bukan pada wacananya namun pada reproduksi wacana yang dibangun oleh para subjek yang hidup di de Britto.

Dalam pemaparan di atas, kekuasaan wacana agama tidak bergerak pada bentuk dogmatis namun justru dalam keterbukaannya untuk digunakan dalam berbagai bentuk realitas. Realitas menjadi sesuatu yang tidak tetap karena keberadaannya ditentukan oleh bagaimana pelaku menafsirkan dan meresponnya. Semakin kuat guncangan persoalan yang dihadapi oleh para guru di tengah kompleksitas kekuasaan pasar yang tak jelas lagi bentuknya dan lokasinya, semakin kuat pula spiritualitas digunakan dalam membacanya. Hal itu menjawab mengapa di tengah gencar dan kentalnya pengaruh pasar, identitas kegamaan lebih bertumbuh pesat dibandingkan masa ketika dominasi negara menguat. Ini tidak dapat ditafsirkan bahwa agama dijadikan pelarian subjek di tengah ketidakmampuan menghadapi peliknya kehidupan sosial akibat pasar. Hal ini justru menunjukkan pergeseran spiritualitas menjadi sesuatu yang dikonsumsi untuk meraih hasrat kepuasan di tengah keterbatasan. Dengan kata lain, institusi pendidikan bukan alat reproduksi agama kepada para subjek yang hidup di dalamnya. Justru lingkungan pendidikan membuka kemungkinan agama menjadi sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh para subjek yang hidup di dalamnya.

Kerapuhan tidak bisa diterima karena tidak memberikan fiksasi dan rasa aman di tengah zaman yang dipandang penuh ancaman. Kendaraan dalam pencapaiannya adalah spiritualitas. Spiritualitas membangkitkan pribadi yang rapuh menjadi matang dan kuat. Spiritualitas membangkitkan pula romantisme masyarakat Kolese de Britto yang kuat secara kolektif. Suasana tersebut menjadi bagian dari terbentuknya masyarakat konsumsi yang gemar mengimajinasikan diri secara ideal di tengah pergulatannya. Untuk menguatkan imajinasi dan identitas sebagai hasil dari imaji yang diinginkan, simbol dilahirkan. Pertarungannya kini bukan pada wilayah yang material, namun pada wilayah simbolik.

Hasrat melengkapi diri dengan identitas keagamaan yang bersifat pasti menimbulkan sensasi imajiner bagi penghuni sekolah. Patung dengan kegagahan pose, slogan spiritual yang semakin kental, dan rutinitas pertemuan alumni menjadi bagian dari konsumsi imaji. Komersialisasi justru terletak pada titik tersebut, yaitu pada imajinasi yang dipertukarkan, bukan lagi pada materi seperti fasilitas yang lengkap atau jaminan pendidikan yang bermutu. Spiritualitas dikonsumsi dalam bentuknya yang imajinatif dan sangat mungkin ditawarkan sebagai benda yang bisa dipertukarkan. Benda tersebut bernama identitas, yang juga dapat diartikan sebagai manifestasi dari imajinasi.

Agama dan pendidikan bermain pada wilayah yang seolah steril dari kepentingan pasar. Namun, pasar mampu mengubah agama dan pendidikan dalam bentuk-bentuk materialnya (kini mengarah pada visual) melalui imajinasi yang dibangun oleh hasrat masyarakat. Hasrat tersebut mendorong lahirnya bentuk-bentuk visual tertentu yang justru dikendalikan oleh imajinasi. Bukan *signifier* (penanda) yang menentukan *signified* (petanda), namun *signified* yang menentukan *signifier* sekehendak hasrat. Dengan kata lain, kekuatan perubahan bukan didominasi oleh struktur material yang menentukan manusia, sebaliknya manusia bersama hasratnya menentukan bagaimana sekolah dipertunjukkan dan ditampilkan. Salah satu yang menjadi hasrat dari Kolese de Britto adalah kebebasan (*desire to be free*) yang membentuk masyarakat khusus dengan kebanggaan atas keunggulannya. Hasrat tersebut memunculkan imajinasi mengenai SMA Kolese de Britto di masa lalu yang lengkap dengan siswa-siswanya yang unik dan unggul secara intelektual. Imajinasi tersebut kemudian menentukan bentuk pendidikan, bentuk bangunan, dan segala visualisasi yang mendukung petanda tertentu sesuai imajinasi.

Penutup

Sebelum menutup tulisan, penulis kembali pada persoalan awal yang hendak dijawab dalam pembahasan ini, yaitu "apakah sekolah masih berpotensi memiliki peran penting bagi masyarakat?" Bagi penulis, sekolah masih memiliki potensi yang besar dalam memainkan peranan bagi pendewasaan masyarakat. Potensi tersebut menjadi ada sejauh sekolah mampu menghidupkan wacana ideologisnya di tengah tuntutan pragmatis negara, agama dan pasar. Kata "menghidupkan" mengandaikan bahwa wacana bukan sekedar benda mati yang tergeletak begitu saja sebagai benda "*klangenan*," namun secara dialektis terus bergeliat dan bermaterial dalam keseharian komunitas masyarakat sekolah sehingga tidak berhenti sebagai mitos tanpa makna.

Geliat pemaknaan sendiri akan semakin nampak justru ketika setiap pribadi dalam komunitas sekolah mengalami benturan-benturan dengan kekuasaan negara, agama dan pasar yang membatasi kemampuan pribadi tersebut ketika hendak membahasakan ideologi yang tidak sekedar diyakini namun diinginkannya. Kata "ingin" hendak merujuk pada sebetuk ideologi yang muncul dalam diri pribadi tersebut bukan semata hasil dari konstruksi gradual dari komunitas dimana dia hidup. Hal tersebut mengandaikan bahwa ideologi dalam penelitian ini tidak mengacu pada sebetuk tatanan baku (*langue*) yang bersifat kolegiat namun lebih bersifat partikular bahkan singular (*parole*).

SMA Kolese De Britto menggalati wacana pendidikan bebas sejak 1963 sebagai ideologi yang mendasari setiap perilaku pendidikannya. Wacana tersebut bersifat partikular karena tidak sekedar ditumbuhkan dari pandangan, pemikiran atau ideologi *mainstream* di luar dirinya namun justru merupakan respon atas kebenaran yang mapan pada masanya, tahun 1960-an. Kata "bebas" sendiri tidak bisa dilepaskan dari pemikiran para anggota Serikat Yesus yang hidup di SMA Kolese de Britto. Namun, sebagai turunan organisatif dari lembaga Serikat Yesus, SMA Kolese de Britto tetap memiliki ciri khas sendiri ketika disandingkan dengan kolese-kolese lain milik Serikat Yesus. Kekhasan itu ditampakkan pada wacana pendidikan bebas yang hanya ada di Kolese de Britto.

Persoalan lanjut yang kemudian dimunculkan dalam penelitian ini adalah bagaimana wacana pendidikan bebas tersebut harus memanfaatkan momentum. Seperti sudah diuraikan pada bagian pembuka tulisan ini, waktu menjadi sedemikian nyata ketika kekuasaan yang hadir saling menggeser satu sama lain dalam setiap periodisasinya. Pada satu waktu negara menonjol dan pada waktu yang lain pasar mengambil alih. Dalam perubahan-perubahan waktu, jenis dan tipologi komunikasi kekuasaan juga berubah. Di sinilah letak soal yang kemudian dibahas oleh tulisan ini.

Dalam penelusuran di SMA Kolese de Britto, penulis menemukan tiga kesimpulan umum yang menggali hubungan dinamis antara sekolah dan kekuasaan negara, agama dan pasar pada rentang 1960-2000. Pertama, wacana pendidikan bebas yang diproduksi pada tahun 1960-an dan terus direproduksi pada tahun 1970-2000 oleh masyarakat Kolese de Britto memiliki kekuatan ideologisnya di hadapan intervensi negara melalui saluran kebijakan dan kurikulum pendidikan. Kekuatan ideologis tersebut ditunjukkan oleh kemampuannya untuk merebut otonomisasi pembacaan atas realitas sosial yang pada rentang tahun 1970-1998 dikuasai oleh wacana pembangunan dan determinasi ekonomi. Kekuasaan negara pada satu sisi membatasi ruang gerak Kolese de Britto dalam mengekspresikan

hasil pembacaannya, namun pada sisi yang lain justru membuka kemungkinan tumbuhnya energi resisten yang kreatif. Semakin kuat batas kekuasaan dibangun dalam hubungan antara negara dan sekolah, semakin produktif perlawanan mencari bentuknya yang kreatif dan aman.

Kedua, perkembangan pasar dan perubahan budaya yang ditimbulkannya tidak secara responsif ditolak ataupun dilawan oleh Kolese de Britto. Hal itu disebabkan karena pasar menyimpan kompleksitas tersendiri dan ideologi pasar merasuk hingga wilayah internal sekolah. Potensi Kolese de Britto sebagai gerakan sosial di hadapan pasar justru terbaca dari kemampuannya menggeser wacana pendidikan bebas pada wilayah-wilayah yang mampu mengeksploitasi perubahan-perubahan budaya yang ditimbulkan oleh kekuatan pasar. Aktualisasi sebagai hasrat mengonsumsi identitas eksistensial diberikan ruang yang bebas untuk tumbuh di kalangan masyarakat Kolese de Britto. Menghindar dari pusaran persaingan sekolah, SMA Kolese de Britto membangun distingsi identitasnya melalui aktualisasi para guru dan siswa pada bidang-bidang di luar ranah pendidikan (karya tulis, seni dan pertunjukkan) meski bukan untuk "berjualan", melainkan untuk memuaskan hasrat eksistensial.

Ketiga, dalam hubungan Kolese de Britto dengan agama, spiritualitas religius memiliki dua peran dalam proyek perjuangan sosial yang dilakukan di hadapan negara dan pasar. Pertama, dalam menghadapi kekuasaan negara, spiritualitas berperan menajamkan otonomisasi wacana pendidikan bebas di hadapan wacana *mainstream* pendidikan. Namun, dalam suasana di mana negara semakin menguat dan bersifat mengancam, spiritualitas menjadi salah satu siasat menyembunyikan perjuangan kebebasan pada wilayah religius agama yang terkesan netral. Kedua, dalam menghadapi kekuasaan pasar, spiritualitas berperan menguatkan identitas eksistensial para subjek (guru, siswa dan karyawan) di Kolese de Britto yang hidup di tengah kompleksitas sosial yang sarat perayaan kehidupan yang konsumtif. Namun dalam peran yang lain, spiritualitas menjadi bagian yang bersifat mengentalkan identitas Kolese de Britto sebagai sekolah Katolik yang secara eksistensial hidup di tengah persaingan *image* antar sekolah. Dalam beberapa hal, simbolisasi Kolese sebagai sekolah milik Yesuit masih memiliki daya pikat yang besar di tengah masyarakat konsumen pendidikan.

Melalui ketiga kesimpulan di atas, muncul sebuah pertanyaan besar yang relevan dengan dunia pendidikan secara umum yaitu bagaimana menemukan forma pendidikan sekolah di tengah hubungannya dengan negara, pasar dan agama? Berangkat dari hasil temuannya, penelitian ini melihat bahwa ideologi memiliki peran krusial dalam mengolah, menentukan dan menjalankan orientasi

pendidikan sebuah sekolah. Tanpa ideologi yang hidup dalam setiap wacana yang direproduksi sepanjang perjalanan historis sekolah, dirinya tidak akan sanggup mengada di hadapan kekuasaan yang hidup di luar dan dalam sekolah.

Ideologi sendiri bermula dari keprihatinan kolektif ataupun dari keyakinan spiritual yang terus menerus diasah dan diperbincangkan dalam dialektika interaksi antar subjek yang hidup di dalam sekolah (para guru, karyawan, pimpinan, siswa) maupun di luar sekolah (alumni, komite sekolah dan masyarakat umum) dari tahun ke tahun. Tanpa perbincangan yang dialektis dan kontinual, ideologi akan berhenti pada tataran "statuta," kebijakan atau bahkan monumen memorial sekolah yang tanpa faedah. Satu-satunya cara untuk meraih potensinya sebagai gerakan sosial adalah secara terus menerus membuka wacana ideologis yang hidup di sekolah pada upaya-upaya kritis yang memungkinkannya untuk menjawab persoalan kontekstual di tengah zaman yang terus berubah. Dengan kata lain, ideologi bukan bagian dari dogmatisasi pemikiran dan perilaku namun justru merupakan sumber kemampuan hegemonik sekolah ketika merespon hegemoni kekuasaan yang hidup di luar dirinya.

Daftar Pustaka:

- Ahsin, I. (2007) *Dunia Tanpa Sekolah*, Bandung: Read! Publishing House.
- Bourdieu, P. (1984) *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Djoen, J. O. T. (1976) "Pendidikan Bebas di SMA Kolese de Britto Sebagai Sikap Dasar," dalam Yayasan de Britto, *Pendidikan Bebas Menuju Pribadi Mandiri*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan de Britto.
- Drost, J. (1993) *Menjadi Pribadi Dewasa dan Mandiri: Beberapa Pemikiran Penting Pembentukan Generasi Muda*, Yogyakarta: Kanisius.
- Drost, J. (1998) *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, A. (1986) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, California: University of California Press.
- Giroux, A. H. (1997) *Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling*, Boulder: Westview Press.
- Hutagalung, D. (2008) "Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe," dalam E. Laclau dan C. Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book.
- Koelman, G. (1978) "Kenangan De Britto 56-73," dalam G. Sukadi (ed.) *Kenangan Reuni 30 Tahun SMA Kolese De Britto*, Yogyakarta: Panitia Reuni 30 Tahun.

- Laclau, E. (2005) *On Populist Reason*, London: Verso.
- Laclau, E. dan C. Mouffe (2008) *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post-Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book.
- Mouffe, C. (2005) *On The Political*, London: Routledge.
- Pora, Y. (2004) *Selamat Tinggal Sekolah*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Prasetyo, E. (2004) *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta: Insist Press.
- Serikat Yesus (1987) *Ciri-Ciri Khas Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Yesuit*, Semarang: Serikat Yesus Provinsi Indonesia.
- SMA Kolese de Britto (2009) *Kadang Manuk yang Pergi dan Kembali*, Yogyakarta: Panitia Lustrum XII dan Reuni Akbar ke-60 SMA Kolese de Britto.
- Tilaar, H. A. R. (2005) *Kekuasaan & Pendidikan*, Magelan: Indonesia Tera.
- Topatimasang, R. (2007) *Sekolah itu Candu*, Yogyakarta: Insist Press.
- Yayasan de Britto (1999) *Pendidikan Bebas menuju Pribadi Mandiri*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan de Britto.
- Yayasan de Britto (2008) *Banyak Jalan menuju LA 161: Kisah-Kisah Kecil Menjadi Guru*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan de Britto.